

**GOVERNABILITY PEMERINTAH KALURAHAN DALAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KALURAHAN CATURTUNGGAL,
KAPANEWON DEPOK, KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Disusun oleh:

NOVEN CRISTEAN

18520144

**JENJANG PENDIDIKAN STRATA SATU (1)
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2023

HALAMAN JUDUL

GOVERNABILITY PEMERINTAH KALURAHAN DALAM

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KALURAHAN

CATURTUNGGAL, KAPANEWON DEPOK, KABUPATEN SLEMAN,

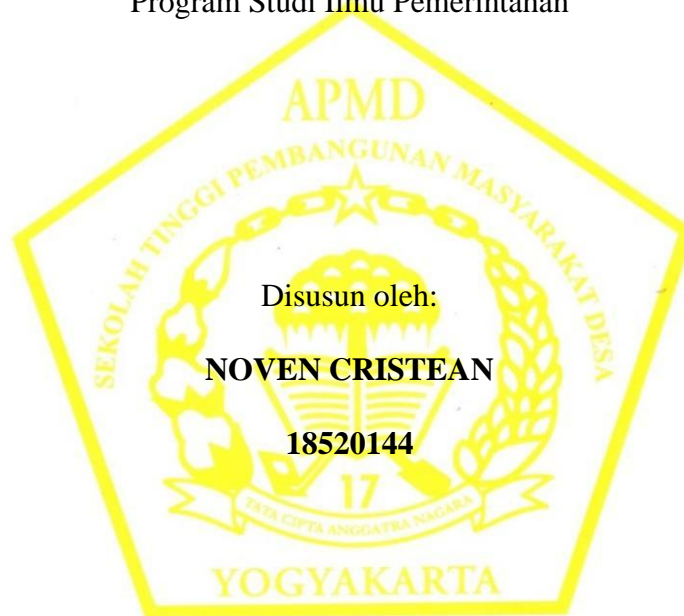
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SKRIPSI

Disusun Sebagai Tugas Akhir Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S-1)

Program Studi Ilmu Pemerintahan



Disusun oleh:

NOVEN CRISTEAN

18520144

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2023



HALAMAN PENGESAHAN





Skripsi ini telah diuji dan diperhatikan di depan Tim Penguji Jurusan Ilmu Pemerintahan untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 21 Juni 2023

Jam : 09:00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

| NAMA | TIM PENGUJI | TANDA TANGAN |
|--|---|---|
| <u>Dr. Supardal, M.Si</u> Ketua Penguji/ Pembimbing |  |  |
| <u>Dra. B Hari Saptaning Tyas, M.Si</u> Penguji samping I | |  |
| <u>Analius Giawa, S.IP., M.Si</u> Penguji Samping II | |  |

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan


Dr. Rijel Samaloisa

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“GOVERNABILITY PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KALURAHAN CATURTUNGGAL, KAPANEON DEPOK, KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”** adalah benar karya tulis saya sendiri yang disusun sebagai salah satu kewajiban guna untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata Satu (S-1) di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Semua sumber data yang saya gunakan dalam penelitian ini telah saya cantumkan sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan atau plagiat dalam skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Yogyakarta 21 Juni 2023.

Penulis



Noven Cristean

18520144

MOTTO

A Bond, A Pledge, A Commitment

(Covenant 2023)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam dan telah diselesaikannya tugas akhir ini, penulis mempersembahkannya kepada:

1. Tugas akhir ini dipersembahkan kepada kedua orang tua Bapak, Mama, Nenek, ade Jeni dan Herlly karena telah senantiasa menemani membantu hingga skripsi ini selesai dan telah mensupport baik moril maupun materi sehingga penulis tidak merasakan kesulitan apapun saat menjalani pendidikan.
2. Juga kepada kekasih, rekan, pendengar, pendamping penulis Lina Elvira S.E yang telah menemani saya melewati banyak hal, melalui banyak perkara yang terjadi.
3. Juga kepada teman-teman penulis baik itu teman kuliah ataupun abang-abang koboy kampus Jerry, Boming, Hendro, Galido, Aco, Yomo, Titi, Rolly, Sopian, Thomas, Erik, jos, Revaldi, Reza yang telah menjerumuskan dan sekaligus memberi masukan, semangat, arahan hingga akhirnya melewati masa pendewasaan.
4. Juga kepada Hewan Peliharaan saya yang membantu saya dalam menghilangkan atau menambah beban Acen, Aacel, Nurul dan Jack.
5. Juga dipersembahkan kepada Almamater saya Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.
6. juga kepada persembahkan kepada pihak yang adakah lima puluh yang sampai saat ini entah kemana.
7. Juga kepada persembahkan pada pihak yang telah bertanya kapan wisuda.

8. Juga kepada Hindia, The Changcuters, Queen, Arsenal, Post Melone dan The Smith yang menambah semangat pada saat penulisan tugas akhir ini.
9. Juga kepada Olive fried chicken, burjo yang memberi asupan protein dan gizi dasar yang murah dan enak sehingga penulis tidak mendapatkan masalah pencernaan serius sepanjang masa pendidikan.

Penulis menyadari dalam penyusunan tugas akhir ini banyak mempunyai kekurangan. Oleh sebab itu, Adapun kritik maupun saran yang membangun dalam penulisan tugas akhir sekiranya akan membantu demi perkembangan Ilmu Pemerintahan.

Yogyakarta 8 Juni 2023

Hormat Penulis

NOVEN CRISTEAN

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL GOVERNABILITY PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KALURAHAN CATURTUNGGAL, KAPANEWON DEPOK, KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iv |
| MOTTO | v |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vi |
| DAFTAR ISI | viii |
| INTISARI | xi |
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 8 |
| E. Literatur Review | 8 |
| F. Kerangka Konseptual..... | 15 |
| 1. Governability | 15 |
| 2. Pemerintah Kalurahan | 16 |
| 3. Kewenangan Kalurahan | 19 |
| 4. Pemberdayaan Masyarakat | 22 |
| G. Ruang Lingkup Penelitian..... | 26 |
| H. Metode Penelitian..... | 26 |
| 1. Jenis penelitian | 26 |
| 2. Subjek Penelitian | 29 |
| 3. Teknik Pengumpulan Data | 30 |
| 4. Teknik Analisis Data | 30 |
| BAB II PROFIL KALURAHAN CATURTUNGGAL | 33 |
| A. Gambaran Umum | 33 |
| 1. Letak dan Batas Wilayah | 33 |
| 2. Orbitasi/ jarak dari pusat – pusat pemerintahan | 35 |

| | |
|--|------------|
| B. Keadaan Demografis..... | 37 |
| C. Sosial Budaya dan Kelembagaan..... | 43 |
| D. Potensi dan Produk Unggulan Ekonomi Produktif..... | 49 |
| E. Sarana dan Prasarana..... | 53 |
| 1. Sarana dan Prasarana Pendidikan | 53 |
| 2. Sarana dan Prasarana Ibadah | 55 |
| 3. Sarana dan Prasarana Kesehatan | 57 |
| F. Aspek Pemberdayaan yang Dijalankan oleh Pemerintah | 58 |
| 1. Pengelolaan Sampah | 58 |
| 2. Pembinaan dan Pemberian Bantuan Sosial | 58 |
| 3. Fasilitasi Tim | 59 |
| 4. Fasilitas Pembinaan PMKS | 59 |
| 5. Pembinaan dan Pemberian Stimulan Bagi Kelompok-kelompok Masyarakat | 59 |
| 6. Pembinaan dan Pemberian Stimulan Bagi Kegiatan Warga | 60 |
| 7. Kegiatan Non Fisik Lainnya | 60 |
| G. | 62 |
| BAB III GOVERNABILITY PEMERINTAHAN KALURAHAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KALURAHAN CATURTUNGGAL, KAPANEWON DEPOK, KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 64 |
| A. Kapasitas Pemerintah | 64 |
| 1. Kapasitas Pemerintah | 66 |
| 2. Kapasitas Pemerintah | 76 |
| 3. Kapasitas Pemerintah | 81 |
| B. Otoritas Pemerintah | 84 |
| 1. Otoritas pemerintah | 87 |
| 2. Otoritas pemerintah | 93 |
| 3. Otoritas pemerintah | 97 |
| BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN | 106 |
| A. KESIMPULAN..... | 106 |
| B. SARAN..... | 107 |
| DAFTAR PUSTAKA | 108 |
| Lampiran | 111 |

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi governability pemerintah Kalurahan Caturtunggal dalam pemberdayaan masyarakat yang berangkat dari masalah kewenangan dan otoritas pemerintah Kalurahan dalam Perannya melaksanakan UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa fungsi pemerintahan meliputi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan. Dalam menyelenggarakan Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa yang bertujuan untuk menciptakan desa yang mandiri dan memberdayakan masyarakat desa baik dengan segala potensi yang ada.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan judul governability pemerintahan kalurahan dalam pemberdayaan masyarakat Kalurahan Caturtunggal. Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Lalu berdasarkan data yang telah dikumpulkan peneliti melakukan analisis dengan menggunakan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah kalurahan memiliki peran yang sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat kalurahan. Terutama dalam pembangunan infrastruktur dan pembangunan ekonomi lokal. Selain itu, pemerintah kalurahan juga memiliki kewenangan dan otoritas dalam pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial, seperti pelatihan ketrampilan dan Pendidikan lanjutan. Namun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pemberdayaan, seperti terbatasnya anggaran dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, Kerjasama perlu dilakukan pemerintah kalurahan demi peningkatan kapasitas dan otoritas dengan masyarakat demi upaya pemberdayaan masyarakat Kalurahan Caturtunggal.

Kata Kunci : Governability, Kalurahan Caturtunggal, Pemberdayaan Masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Governability merupakan diskursus tentang krisis demokrasi yang berkembang di Amerika Serikat dan Eropa, yang bersamaan dengan krisis kapitalisme karena beberapa hal seperti perang teluk yang berkepanjangan, harga minyak yang melambung tinggi, serta tuntutan pada pemerintah yang semakin besar namun kapasitas pemerintah mengalami penurunan (Sutoro Eko, 2021).

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki organ-organ pelaksana dalam pemerintahan, menurut UUD 1945 pemerintah adalah Presiden, Wakil Presiden dan dibantu oleh Menteri-Menteri. Pemerintah dalam arti luas merupakan organ Negara termasuk DPR pada umumnya disebut sebagai pemerintah yang terdiri dari sekelompok atau individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kewenangan yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan melalui perbuatan dan pelaksanaan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa fungsi pemerintahan meliputi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan. Selain itu, Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, Republik Indonesia menghormati keberagaman dan kedudukan daerah-daerah istimewa dan segala peraturan mengenai daerah dengan mengingat hak-hak asal-usul daerah tersebut. Sehingga dengan landasan tersebut dalam mewujudkan pemerintahan dan pembangunan, masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera, dalam kehidupan bernegara peran pemerintah sangat dibutuhkan rakyat agar dapat mengontrol keseimbangan, (Sugiman, 2018).

Dalam menyelenggarakan hak asal-usul pemerintahan desa sangat dibutuhkan oleh pemerintahan pusat dalam melaksanakan visi dan Peran dari pemerintahan tersebut, sehingga pemerintah desa disini berperan sebagai pengelola dan pengguna dari setiap dana dan kebijakan yang diambil oleh Negara untuk melakukan jalannya pemerintahan dengan melakukan pembangunan dan pemberdayaan yang merupakan hak asal-usul daerah tersebut, dengan menggunakan hak yang diberikan oleh negara kepada Pemerintahan Desa. Semangat besar dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, ialah bertujuan untuk menciptakan desa yang mandiri dan memberdayakan masyarakat desa secara baik dan optimal dengan menggunakan potensi yang ada di desa. Ketentuan yang mengatur sumber dana desa untuk menyelenggarakan pembangunan yaitu peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Dana serta peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dengan tujuan pemberian dana desa

yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga dapat diartikan bahwa dana desa yang berasal dari pusat tidak hanya diprioritaskan untuk pembangunan saja tetapi juga diperuntukan untuk pemberdayaan masyarakat desa, (Hulu et al., 2018)

Sistem pembangunan di Indonesia yang berjalan sebelum hadirnya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dimana pemerintah memusatkan pembangunan dengan cara dari atas ke bawah yang membuat desa menjadi objek penerima kebijakan dari pemerintah pusat, provinsi atau kabupaten tanpa mendengar aspirasi masyarakat desa itu sendiri, berbeda dengan pembangunan dari bawah ke atas dimana masyarakat desa mendapatkan peluang untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan keterlibatan pada pelaksanaan pembangunan, karena masyarakat dapat mengidentifikasi masalah dan kebutuhan dimana mereka tinggal, pemberdayaan masyarakat merupakan strategi pembangunan yang berpusat pada masyarakat sebagai subyek pembangunannya, pemberdayaan perlu didukung oleh pemerintah desa dengan memprioritaskan pemberdayaan sebagai cara dalam meningkatkan harkat dan martabat, agar masyarakat desa dapat berguna dan jauh dari keterbelakangan dan kemiskinan. Sehingga untuk bisa melakukan hal itu itu, pemerintah desa perlu memusatkan perencanaan pada pemberdayaan masyarakat sebagai peningkat pembangunan desa. (Endah, 2020).

Berubahnya paradigma pembangunan menimbulkan kesadaran tentang peran masyarakat dalam seluruh proses pembangunan membuat pemberdayaan masyarakat muncul sebagai kepentingan pembangunan. Berkenaan dengan konsep pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan merupakan bentuk upaya dalam membangun suatu sumber daya, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran serta potensi daya yang positif. Pemberdayaan bukan hanya meliputi kekuatan individu atau anggota masyarakat tetapi menanamkan nilai-nilai modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan dan bertanggungjawab adalah nilai-nilai pokok dari upaya pemberdayaan. (<https://bpps.kemensos.go.id>, 2020).

Peningkatan yang bersifat pemberdayaan masyarakat ini sengaja dilakukan pemerintah desa untuk memfasilitasi masyarakatnya dengan merencanakan, memutuskan dan mengelolah sumberdaya yang mereka miliki agar dapat dikelola dan dimanfaatkan sendiri yang pada akhirnya mereka dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Dalam pemberdayaan masyarakat pemerintah patut menggerakkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan yang digerakan pemerintah, agar masyarakat dapat berperan dan berdaya, (Noor, 2011).

Penyelenggara pemerintahan desa menurut UU No. 23 Tahun 2014 yaitu; pengaturannya yang berdasarkan pemikiran keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat desa yang dimana menjadi pengaruh terhadap kelembagaan, keterampilan dan pengetahuan yang mempengaruhi kehidupan orang yang menjadi target dari

pemberlakuan pemberdayaan. Peran pemerintahan desa disini sebagai mengimplementasi suatu kebijakan di dalam pemerintahan desa seperti kepala desa dan LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) yang bekerja sama dalam menyusun rencana pembangunan yang berbasis pada perbaikan mutu hidup masyarakat desa. Maka dalam melakukan upaya tersebut sebaiknya membuka kesempatan pada masyarakat sebagai penggali gagasan program-program, sehingga masyarakat dapat ikut mengendalikan atau mengontrol bagaimana berjalannya suatu program oleh pemerintah desa sebagai pelaksana. (Ulumiyah, 2013).

Pemerintah desa sebagai garda utama dalam pemberdayaan masyarakat desa memiliki agenda sesuai dengan pembangunan nasional berbasis pembangunan masyarakat desa. Usaha atau program yang perlu diperhatikan pemerintah desa tersebut meliputi kesehatan, pendidikan, sosial ekonomi serta pembangunan infrastruktur hingga agenda pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaannya pemerintah desa seringkali kurang, dalam pengawasan dan pelaksanaan sehingga agenda atau program yang telah terencana menjadi tidak maksimal, dalam pelaksanaannya maka pemerintah desa perlu lebih fokus agar dalam melaksanakan tugas nya sebagai pengontrol program pemberdayaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan dari program pemberdayaan tersebut, (Almasri et al., 2014).

Kalurahan Caturtunggal merupakan salah satu pemerintahan desa yang memiliki kawasan dengan perkembangan dan perubahan yang cukup

baik dan sangat dinamis dari sisi pemerintahan, perekonomian, kependudukan, serta sosial kemasyarakatannya. Aspek tersebut tentu akan berpengaruh besar terhadap pola kehidupan masyarakat. Kawasan Desa Caturtunggal merupakan wilayah perkotaan dan pedesaan yang komunitasnya terdiri dari pendatang, pedagang, pengusaha, maupun pencari kerja yang mengakibatkan peningkatan kebutuhan hidup menjadi sangat pesat. Dengan itu pemerintahan Desa Caturtunggal memberi program pemberdayaan pada masyarakat yang dapat meningkatkan aspek-aspek yang senantiasa mengalami perkembangan dengan program pemberdayaan kemasyarakatan. Untuk menunjang kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan fungsi dari Pemerintahan Desa yang memfasilitasi masyarakat dalam pemberdayaan, Pemerintah Desa yang dituntut untuk mengawasi dan memfasilitasi program tersebut hingga menghasilkan masyarakat yang berdaya atau mampu meningkatkan ekonominya sendiri.

<https://depok.slemankab.go.id> (2017).

Namun otoritas pemerintahan Kalurahan Caturtunggal yang dijadikan sebagai landasan dalam penelitian ini diantaranya tentang Governability dimana menunjukkan Otoritas Pemerintah, Strong Government, Fall Government, Collapse Government, Shadow Government, Lokal Bossism, Divided Government dan Kapasitas Pemerintah. Dimana dalam melihat peran dari Kalurahan Caturtunggal menggunakan otoritasnya sebagai penyelenggara pemerintahan dalam pemberdayaan masyarakat di Kalurahan Caturtunggal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Governability Pemerintah Kalurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta”** Hal ini juga memiliki maksud dan tujuan yang sama demi peningkatan sumberdaya manusia dan masyarakat yang berdaya guna. Artinya desa juga dapat menggunakan hak dan kewenangannya sebagai lembaga pemerintahan yang memiliki kapasitas dan otoritas untuk mengurus atau mengatur rumah tangganya sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga desa dapat berinovasi sesuai perspektif nya untuk menuju desa yang mandiri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana **“Governability Pemerintah Kalurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kalurahan Caturtunggal?**

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari pemaparan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka peneliti ingin mengkaji atau mengungkapkan bagaimana **Governability Pemerintah Kalurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kalurahan Caturtunggal.**

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini terdapat dua manfaat yaitu;

1. Manfaat Teoritis

kajian ini diharapkan akan menjadi sarana pengetahuan dan sumbangsi wawasan pada akademik maupun jurusan Ilmu Pemerintahan melalui penelitian mengenai Governability Pemerintahan Kalurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kalurahan Caturtunggal.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk peneliti, diharapkan dapat menjadi pengalaman dan menambah wawasan dalam meningkatkan peran pemerintah desa.
- b. Untuk pemberdayaan dan Pemerintah Kalurahan, diharapkan menjadi bahan acuan dan evaluasi. Dengan meningkatkan Governability Pemerintah Kalurahan dalam pemberdayaan masyarakat.

● E. Literatur Review

Sebelum melakukan penelitian mengenai Peran Pemerintah Kalurahan Caturtunggal Dalam Pemberdayaan Masyarakat, peneliti terlebih dahulu melakukan tinjauan pustaka yang telah dilakukan peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Berikut ini adalah beberapa penelitian sejenis dan berkaitan, yang menjadi acuan untuk melakukan penelitian ini;

Penelitian yang dilakukan oleh Mikhael Wurangian pada tahun 2015, dalam jurnal berjudul “Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Bagi Masyarakat Petani Desa Basaan I

Kecamatan Ratatotok)” peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. dari hasil observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan pemberdayaan masyarakat adalah perwujudan dari pengembangan kapasitas masyarakat dengan pemberdayaan sumberdaya manusia dengan hak dan kewajibannya sesuai dengan status dan peran masyarakat. Pemberdayaan ini berangkat dari lemahnya posisi masyarakat dalam menuntut hak dan kewajibannya, ditambah lagi kurangnya akses masyarakat pada informasi, teknologi, permodalan usaha, hukum dan apalagi kemampuan kontrol. Berbagai kelemahan akses tersebut diawali lagi dengan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat pedesaan, beragam strategi pendukung dalam pemberdayaan yang dilakukan pemerintah pada masyarakat juga bermaksud meningkatkan potensi dan meningkatkan kesejahteraan agar pengembangan kapasitas masyarakat juga seiringan dengan perkembangan teknologi dan informasi, (Mikhael, 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Kiki Endah (2020), dalam jurnalnya yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa” peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian tersebut peneliti menyimpulkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya memberikan kekuatan atau daya bagi masyarakat sehingga keluar dari permasalahan yang dihadapi. Dengan pemberdayaan sebagai media bagi perubahan masyarakat yang dapat memungkinkan perubahan dengan bersandar pada kemampuan, prakarsa dan partisipasi masyarakat desa sendiri, (Endah, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Endang Hermawan dkk, (2021), dalam jurnalnya yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tritawangunan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat” dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa Peran Pemerintah Desa Sebagai Pelaksana Kebijakan bekerjasama dalam penyusunan perencanaan program pemberdayaan masyarakat desa. Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah desa berupa penyusunan rencana pemberdayaan yang menghasilkan kebijakan. Kebijakan yang dirumuskan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa adalah: a. meningkatkan peran serta masyarakat dalam menyukseskan pemberdayaan masyarakat desa. b. meningkatkan pemberdayaan aparatur desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa, (Pebriyani & Hermawan, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Zuhaqiqi, (2020), dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat (Studi Kasus Desa Salut Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara)” dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan pemerintah Desa baik berupa bantuan modal, pemikiran dan ide-ide terhadap masyarakat untuk menunjang kesejahteraan masyarakat sudah dilakukan oleh pemerintah Desa Salut, pemberdayaan yang dilakukan juga oleh pemerintah Desa Salut untuk

mengurangi kesenjangan kesejahteraan melalui pemberdayaan. Sehingga pemerintah desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, (Zuhaqiqi, 2020)

Penelitian yang dilakukan oleh Bambang Suswanto pada tahun 2019, dalam jurnalnya yang berjudul “Peran Pendamping Pemerintah Desa Dalam model Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan” dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Pasuruan berlokasi di Kabupaten Cilacap, tepatnya di Kecamatan Binangun yang memiliki potensi dan karakteristik usaha ekonomi pertanian khususnya padi, ternak lele dan salah satu sentra pengrajin anyaman bambu untuk kandang ayam dan burung serta sapulidi. Jumlah penduduk menurut data demografi desa 2017 kurang lebih 5.700 jiwa dengan luas wilayah 2,108 Ha. Desa Pasuruan dapat mengembangkan potensi hasil pertanian dan kelompok usaha karena memiliki akses pasar yang dekat seperti ke pasar Kroya dan tempat wisata pantai khususnya lokasi wisata pantai widrapayuung daerah Desa Sidaurip Kecamatan Binangun Cilacap Jawa Tengah, (Suswanto et al., 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Boedijono, (2019), dalam jurnalnya yang berjudul “Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bondowoso” dalam jurnal penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan pemberdayaan Ekonomi masyarakat antara lain berupa peningkatan kapasitas masyarakat,

usaha ekonomi produktif, kapasitas lembaga masyarakat, pembangunan teknologi tepat guna, serta pelatihan kerja. Sedangkan efektivitas pembangunan keuangan desa dalam pembangunan yaitu 98% atau berada dalam kategori efektif. Sedangkan penggunaan efektifitas untuk pemberdayaan masyarakat sebesar 85% yang berada dalam kategori cukup efektif, (Boedijono et al., 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Iriani Margayaningsih, (2018), dalam jurnalnya yang berjudul “Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa” dalam jurnal penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan peran masyarakat kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Waung, dengan fokus melihat bagaimana peran masyarakat sebagai pelaku, sebagai partisipan dan sebagai peserta, dalam faktor-faktor pendukung seperti motivasi dari diri sendiri maupun dari pemerintah desa yang mendukung dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Waung, (Margayaningsih, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Andi Ansar Firman pada tahun 2021, dalam jurnal nya yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat di Desa Berbasis Komunitas” dalam jurnal penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan pemberdayaan masyarakat desa berbasis komunitas dan pada dasarnya merupakan pendekatan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan warga desa yang difasilitasi oleh pemangku kepentingan selaku pihak

eksternal. Proses pemberdayaan juga membutuhkan pemahaman yang baik tentang hubungan antara masyarakat desa dengan potensi warga desa termasuk juga dengan aspek sosial politik, ekonomi dan kearifan lokal masyarakat desa. Hal ini disebabkan fokus utama dari pemberdayaan komunitas desa adalah dapat memberikan manfaat bagi masyarakat desa menuju kemandirian ekonomi warga setempat, (Firman, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Aditiya Eka Trisnawati dkk pada tahun 2018, dalam jurnal nya yang berjudul “Pengembangan Desa Wisata dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal” dalam jurnal penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan pengembangan produk model pelatihan atau pemberdayaan menunjukkan keefektifan nya terhadap pengembangan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal dengan metode materi disesuaikan dengan basis kebutuhan peserta mengenai potensi yang ada dengan respon dan yang baik dari masyarakat, (Trisnawati et al., 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Adam Hilman pada tahun 2017, dalam jurnal nya yang berjudul “Model Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Komunitas” dalam jurnal penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Dadapan pada mulanya dengan pembentukan kelompok kecil dan kemudian dilakukan pelatihan manajemen, pendampingan sampai masyarakat mampu menjalankan kegiatan nya kontribusi ini cukup efektif membuat masyarakat

wanita khususnya memberi kontribusi positif terhadap kehidupan mereka secara ekonomi hingga psikologis, (Hilman & Nimasari, 2018).

Berdasarkan hasil review beberapa penelitian di atas mengenai Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat yang inovatif dan kreatif. Dengan menunjukkan beberapa fenomena kesamaan yang terfokus dari hasil program pemberdayaan dan model pemberdayaan tersebut. Sehingga peran dari Pemerintah Desa atau tanggung jawab pemerintah desa kurang terjabarkan dengan baik. Maka, dalam penelitian ini secara tegas beberapa ruang belum dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dengan demikian peneliti ini hendak berfokus pada **“GOVERNABILITY PEMERINTAHAN KALURAHAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KALURAHAN CATURTUNGGAL, KAPANEWON DEPOK, KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”**.

F. Kerangka Konseptual

1. Governability

Konsentrasi dari governability merupakan kapasitas pemerintah dalam menghadapi permasalahan atau krisis yang dihadapi dengan menggunakan governability di mana kapasitas sistem politik dan otoritas pemerintah, dimana pemerintah mempunyai tugas menggunakan otoritas nya dan melakukan tugas nya menggunakan kapasitas nya sebagai institusi yang dimana semakin besar kapasitas dan otoritas yang dimiliki maka

pemerintahan tersebut akan mendapatkan arah yang jelas Sutoro Eko (2021).

a. Kapasitas pada level organisasi pemerintahan dimana inisiatif pembangunan kapasitas dipandang salah satu sistem dimana untuk inisiatif pembangunan yang berada pada konteks nasional yang mencakup seluruh negara atau masyarakat. Dimensi kapasitas pada tingkat ini mencakup bidang pengaturan, kerangka kerja, hukum/peraturan, akuntabilitas kinerja dan sumberdaya yang tersedia. Hingga kapasitas pemerintah dalam pengambilan keputusan, sumber-sumber, prosedur-prosedur, hingga struktur membantu dan mendorong kinerja yang mendukung kebijakan.

b. Otoritas pemerintah merupakan kekuasaan khusus dimana suatu kekuasaan diterima dan diabsahkan oleh karena itu otoritas disebut kekuasaan yang dilembagakan. Otoritas pemerintah disini juga mengambil peran dari suatu dorongan untuk memajukan dan menjaga kinerja dari suatu institusi yang diatur dalam UUD 1945. Otoritas pemerintahan kalurahan memiliki beberapa kekuasaan special seperti yang sudah tercantum dalam UU Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa seperti otoritas dari

pemerintah kalurahan atau desa dalam menjalankan pemerintahan.

2. Pemerintah Kalurahan

Kalurahan adalah perpaduan antara sekelompok manusia dengan lingkungannya dan perpaduan itu ialah suatu wujud atau kemampuan dimuka bumi yang ditimbulkan oleh unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang semakin berinteraksi antar unsur tersebut dan dalam hubungannya dengan daerah lain. Secara eksplisit dalam Undang-Undang dalam pengertian desa, yang dimana terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, menyatakan bahwa “desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. dalam arti bentuk kesatuan administratif yang disebut juga kelurahan. Dengan demikian dalam kota juga dikenal dalam sebutan desa (Ramlan dkk, 2021)

Pemerintahan terkecil dan terendah yang bersinggungan langsung dengan warga ialah desa atau kalurahan. dengan Keaslian yang terletak pada kewenangan otonomi dan tata pemerintahannya, yang diatur dan dikelola berdasarkan atas hak

asal-usul dan adat istiadat setempat. Desa dalam sistem pemerintahan merupakan ujung tombak sukses nya otonomi daerah karena didalam sistem pemerintahannya terdapat suatu hak dan kewajiban desa untuk menjalankan roda pemerintahan agar menimbulkan suatu kesejahteraan masyarakat didalamnya (Dangin Puri Kaja 2019)

Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, guna memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial Negara Indonesia. Mengakui dan menghormati keberadaan desa yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan yang dipimpin oleh kepala desa serta dibantu oleh perangkat desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa, (Sugiman, 2018).

Pengertian pemerintah dalam (KBBI) yakni: (1) sistem yang menjalankan kekuasaan dan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, politik dalam suatu negara. (2) sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas dalam menggunakan kekuasaannya. Secara etimologis pemerintah dapat

diartikan sebagai pekerjaan menyuruh yang melibatkan lebih dari dua pihak, unsur pemerintah dalam arti luas dapat diartikan sebagai pemerintah dibidang legislatif, yudikatif, dan sebagainya. Sedangkan dalam arti sempit dapat diartikan sebagai pemangku jabatan dan sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif sebagai penyelenggara administrasi negara, (Abdullah, 2016).

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Penetapan Aturan-Aturan pokok mengenai pemerintahan sendiri di daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga nya sendiri, dengan penrtimbangan tersebut berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Dasar, yang menetapkan pokok-pokok tentang pemerintahan sendiri didaerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, dimana dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa “Daerah Negara Republik Indonesia tersusun dalam 3 (tiga) tingkatan, ialah: Provinsi, Kabupaten Kota dan Desa dan sebagainya yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Adapun yang dimaksud dengan desa dalam Pasal 1 tersebut adalah daerah yang memiliki syarat-syarat cukup untuk dapat berdiri menjadi daerah otonom seperti desa. Yang arti nya pemerintahan desa memiliki hak wewenang atau pengurus bagi rumah tangga nya sendiri sebagai daerah otonom yang dimana terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, menyatakan bahwa“ desa

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. dalam arti bentuk kesatuan administratif seperti Pemerintahan Desa (Ramlan, 2021).

3. Kewenangan Kalurahan

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan yang di dalam bahasa Belanda disebut “*bevoegdheid*” yang berarti wewenang atau berkuasa. Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam literasi politik-kekuasaan dan hukum tata pemerintahan atau hukum administrasi, karena suatu pemerintahan atau organisasi pemerintah dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam konstitusi maupun regulasi turunannya, seperti peraturan perundang-undangan.

Kewenangan sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kekuasaan dalam membuat keputusan, memerintahkan, dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain. Secara pengertian bebas, kewenangan merupakan hak

seorang individu/kelompok dalam melakukan sesuatu tindakan dengan batas-batas tertentu.

Dalam implementasi kewenangan desa, terdapat 2 (dua) asas yang digunakan oleh desa, yakni; asas rekognisi dan asas subsidiaritas. Asas rekognisi merupakan pengakuan terhadap hak asal usul desa. Artinya desa desa telah mendapatkan pengakuan dan penghormatan dari negara terkait dengan keberadaannya. Asas subsidiaritas merupakan pengambilan keputusan secara berskala lokal untuk kepentingan masyarakat setempat. Kehadiran kedua asas ini menjadi spirit utama dalam mendudukkan kewenangan desa. Kewenangan desa meliputi kewenangan dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, pembinaan masyarakat desa, pembangunan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa.

Sesuai mandat dari UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa ialah mengakui dan menghormati kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan lokal berskala desa. Dengan kewenangan ini, maka diyakini bahwa akan menjadi bentuk pondasi bagi kemandirian desa, yaitu; desa yang berkuasa penuh atas aset-aset yang dimilikinya untuk memenuhi hak-hak dasar penghidupan desa secara berkelanjutan dan guna untuk kesejahteraan masyarakat desa. Kewenangan berdasarkan pada hak asal-usul, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Desa, yang

mencakup pengertian bahwa “hak asal usul” ialah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa. Hak asal usul telah ada sebelum lahir NKRI. Pada tahun 1945 dan tetap dibawa dijalankan oleh desa setelah lahir NKRI sampai sekarang. Disamping itu, hak-hak asli yang muncul dari prakarsa desa bersangkutan maupun prakarsa masyarakat setempat dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Oleh karena itu, maka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 18 dijelaskan bahwa kewenangan desa meliputi; Kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak Asal-usul, dan adat istiadat desa. Artinya pemerintah Kalurahan Caturtunggal memiliki hak dan kewenangan penuh untuk mendayagunakan sumber daya manusia maupun alam untuk merealisasikan program-program pemberdayaan masyarakat di Kalurahan Caturtunggal.

4. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah sebuah upaya membangun daya dengan mendorong untuk membangkitkan potensi yang dimiliki dan mengembangkan potensi yang ada. Upaya yang biasa dilakukan adalah dengan memperkuat potensi masyarakat dengan sumberdaya yang dimiliki untuk mencapai perekonomian yang baik dan dapat menciptakan peningkatan sosial, ekonomi, dan transformasi budaya yang dapat meningkatkan kemandirian pada masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, (Hulu dkk, 2018). Pemberdayaan dapat diartikan sebagai sebuah Tindakan pelimpahan atau pemberian kekuatan (*power*) yang menghasilkan sebuah perubahan lewat potensi yang dimiliki oleh sebuah lingkungan dalam hal ini yaitu desa. Pemberdayaan lebih mengarah untuk mewujudkan pembangunan yang berpusat pada kehidupan masyarakat. Terkait akan pemberdayaan tersebut, masyarakat akan menjadi pelaku utama sekaligus tujuan (*people centre*). Dengan demikian, maka pemerintah akan memiliki peran penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat, (Ridwan, 2019).

Widjaja, (2011) dalam Kiki Endah, (2020), menegaskan bahwa, inti dari pemberdayaan adalah upaya untuk membangkitkan segala kemampuan yang terkandung di dalam desa untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sehingga pencapaian suatu tujuan dapat dilakukan melalui penumbuhan motivasi,

inisiatif, dan kreativitas untuk memajukan suatu perekonomian dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat desa, dan menjadi desa yang lebih berdaya guna.

Dengan lahirnya UU Desa, desa mendapatkan kesempatan untuk memperlihatkan jati diri atau potensi yang sesungguhnya dalam mengatur dan mengelola potensi yang ada di desa desa bersama-sama dengan masyarakat. Selain itu juga desa memiliki kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan asas rekognisi dan subsidiaritas. Dalam Pasal 1 Ayat (12) UU Desa No. 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian desa dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah prioritas kebutuhan masyarakat desa, (Endah, 2020).

Proses pemberdayaan masyarakat biasanya melalui pendekatan kelompok maupun pemerintah dimana ada anggota untuk membagi pengetahuan dan pengalaman ada juga yang bekerjasama agar usaha yang dilakukan berhasil, pemerintahan desa merupakan sistem pemerintahan integral dari pemerintahan nasional maka untuk mewujudkan pembangunan nasional maka pemerintah desa juga perlu mempunyai strategi untuk memajukan

perekonomian masyarakatnya sehingga pemerintah desa banyak melakukan pemberdayaan masyarakat dalam banyak bidang agar masyarakat menjadi pelaku utama perekonomian, maka untuk mewujudkan pembangunan ekonomi pemerintah desa wajib mendorong masyarakat untuk menjadi pelaku usaha mikro dan mendorong produk agar masuk ke toko-toko besar bahkan mall sebagai percontohan dalam perekonomian masyarakat desa yang bersaing.

Menurut Risaldi dalam (Michael, 2015) memberdayakan terdapat 3 bidang cakupan memberdayakan masyarakat, yaitu:

- a. Aset manusia (*human asset*) hal ini terkait tentang pemberdayaan kualitas SDM, yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan *human asset* masyarakatnya dengan melakukan program yang bersih yang biasanya program pelatihan keterampilan dan kemampuan untuk meningkatkan kemampuan, pengalaman sehingga dapat meningkatkan pengetahuan keterampilan dan menghasilkan SDM yang berkualitas.
- b. Pemberdayaan aset modal keuangan (*financial asset*) meliputi tanah, modal, bangunan dan lain sebagainya. Adapun kesulitan dalam akses modal atau ketidak sanggupannya serta ketidakpastian masyarakat dalam pengelolaan menjadi salah satu alasan sulit

nya terealisasi sehingga perlu nya memberdayakan aset atau modal.

- c. Sosial aset (*sosial asset*) seperti keluarga, teman maupun jaringan sosial yang merupakan dukungan emosional, informasi dan akses yang memudahkan dalam pengelolaan aset atau kemampuan yang dimiliki oleh individu tersebut.

Peningkatan keberdayaan masyarakat memerlukan suatu paket secara koheren dari perubahan modal fisik yang dibangun berdasarkan kekuatan sarana dan prasarana pendidikan dalam mengembangkan sumber daya manusia dan kemampuan pelaku pemberdayaan dalam mengembangkan pemberdayaan masyarakat. Untuk dapat meningkatkan keberdayaan masyarakat hendaknya mempertimbangkan aspek modal fisik, modal manusia, modal sosial, kemampuan pelaku pemberdayaan dan proses pemberdayaan sebagai faktor penentu keberhasilan pemberdayaan masyarakat (Widjajanti, (2011) dalam Kiki Endah (2020).

G. Ruang Lingkup Penelitian

Agar tidak menyimpang dari pembahasan maka dalam penelitian ini. peneliti membatasi ruang lingkup Yakini Governability Pemerintah Kalurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Caturtunggal, dengan menggunakan tiga indikator dari Risaldi dalam Michael (2015),

yaitu; Aset manusia (*humman asset*), Pemberdayaan aset modal keuangan (*financial asset*), Sosial aset (*sosial asset*).

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2017) penelitian kualitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, hal ini digunakan untuk meneliti kondisi yang bersifat objek ilmiah yang mana peneliti hadir sebagai *tableic* kunci dengan menggunakan tabel pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis data yang bersifat induktif/kualitatif, dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Penelitian yang bersifat kualitatif akan berfungsi bagi peneliti, hal ini juga merupakan bekal bagi peneliti, agar dapat memahami konteks lebih luas dan jauh lebih mendalam. Selain itu, hala ini akan menjadi bekal untuk bisa memahami konteks secara lebih luas dan mendalam. Dengan demikian maka penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan fenomena *table* yang sedang terjadi secara jelas dan cermat, sehingga metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Creswell juga memberikan definisi mengenai penelitian kualitatif yaitu sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sosial yang sentral, (Creswell dalam Sugiyono: 2017)

Pada umumnya pada penelitian kualitatif menggunakan survei sebagai metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data melalui survei memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Informasi yang diperoleh dari sekumpulan orang-orang yang dipercayai.
- b. Informasi yang diperoleh dari sekumpulan orang-orang tersebut merupakan sampel.
- c. Informasi yang diperoleh melalui bertanya dengan beberapa pertanyaan.

Dalam laporan penelitian data yang penulis sajikan berupa naskah wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi resmi lainnya. Sedangkan pengelolaan dan penyajian data peneliti menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang tidak menggunakan perhitungan tableic. Sedangkan menurut Danim, (2002) mengartikan bahwa kualitatif termasuk konstruktivisme yang beranggapan bahwa kenyataan memiliki dimensi jamak. Dapat diartikan juga sebagai pertukaran pengalaman table yang dapat didefinisikan lewat hasil penelitian jadi, penelitian kualitatif beranggapan bahwa kebenaran bersifat dinamis dan dapat dilakukan melalui kajian ataupun interaksi table.

Peneliti berpendapat bahwa penelitian deskriptif kualitatif dapat lebih menjelaskan dengan tabel-bahasa yang dapat menggambarkan suatu fenomena sehingga lebih sistematis.

Fenomena tersebut berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya.

2. Subjek Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

Tabel 1.1
Subjek Penelitian

| No | Nama | Umur | Pendidikan | Status |
|----|--------------------------|------|------------|---------------|
| 1 | Agus Santoso, S.Psi., MM | 47 | S2 | Lurah |
| 2 | Aminudin Aziz, M.Pd | 54 | S2 | Carik |
| 3 | Andi Suwarno, S.IP | 46 | S1 | Kep Pangripta |
| 4 | Dwi Yulianto | 47 | SMP | Sek BPKal |
| 5 | Irma Wulandari, A.MD. Gz | 36 | D III | Staf Pamong |
| 6 | Yacobus, S.E. | 42 | S1 | Warga |
| 7 | H. Suseno | 55 | SMA | Ketua RT 03 |
| 8 | Hendro | 58 | SMA | Warga |
| 9 | Siti | 60 | SMA | Warga |
| 10 | Fitri | 32 | SMA | Warga |

Tabel daftar subjek penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono, (2016) teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dalam melakukan penelitian adalah mendapatkan data. Berdasarkan hal tersebut dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview (wawancara), observasi (pengamatan) dan dokumentasi.

4. Teknik Analisis Data

Menurut Gunawan, (2017) analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda, dan mengkategorikannya sehingga memperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Dengan menggunakan cara tersebut akan lebih mempermudah peneliti untuk merangkum data-data yang berserakan dan bertumpuk-tumpuk agar bisa disederhanakan dan mudah dipahami.

Menurut Sugiyono, (2017) analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang dapat diperoleh dari hasil seperti; wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dengan baik dan benar.

Pada penelitian ini untuk menganalisis data penelitian kualitatif menggunakan tiga tahapan yang ditemukan oleh (Miles & Huberman:1984 dalam Sugiyono:2017) yaitu:

a. Reduksi Data (*data reduction*)

Menurut Sugiyono (2017) mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b. Data display (penyajian data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Penyajian data dilakukan berdasarkan data yang telah dikumpulkan dari semua informan. Setelah data terkumpul langkah selanjutnya peneliti menganalisis untuk selanjutnya dikategorikan mana yang diperlukan dan tidak diperlukan.

c. Penarikan Kesimpulan (*conclusion drawing*)

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif, Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2017) mengatakan dalam penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan setelah peneliti melakukan analisis data dengan menggunakan verifikasi terlebih dahulu, sehingga dapat terlihat bahwa apakah rumusan masalah telah terjawab, dan tujuan penelitian tercapai. Penarikan

kesimpulan juga dilakukan untuk menguji akan kebenaran serta mencocokkan dengan data yang ada, kemudian diperoleh data yang valid dan jelas. Selain itu penarikan kesimpulan dilakukan untuk memberikan deskripsi dari banyaknya informasi yang diperoleh serta mendapatkan informasi akhir.

BAB II

PROFIL KALURAHAN CATURTUNGGAL

A. Gambaran Umum Kalurahan Caturtunggal

1. Letak dan Batas Wilayah

Kalurahan Caturtunggal adalah salah satu Kalurahan yang terletak di wilayah Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya di Padukuhan Mrican dengan koordinat 7°46'48" LS, dan 110°23'45" BT, dengan luas wilayah 11.070.000 M² atau 889.7480 Ha, untuk daerah dengan PTN terbanyak, maka daerah ini nyaris seperempatnya dihuni oleh mahasiswa. Banyak terdapat lokasi indekos dan penginapan. Pada mulanya Kalurahan Caturtunggal merupakan penggabungan wilayah yang terdiri dari 5 (lima) kelurahan, yakni Kelurahan Karangwuni, Kelurahan Mrican, Kelurahan Demangan, Kelurahan Ambarukmo, dan Kelurahan Kledokan. Sesuai Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diterbitkan tahun 1946 mengenai Pemerintahan Kelurahan, maka lima kelurahan tersebut selanjutnya digabung menjadi satu desa/kelurahan yang otonom dengan nama Desa Caturtunggal yang secara formal ditentukan sesuai Maklumat Nomor 5 Tahun 1948 tentang Perubahan Daerah-daerah Kelurahan.

Kalurahan Caturtunggal merupakan kawasan yang

senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan yang dinamis, baik dari aspek pemerintahan, perekonomian, kependudukan maupun sosial kemasyarakatan. Secara geografis aspek itu akan berpengaruh terhadap pola kehidupan masyarakat. Disamping pengaruh yang bersifat positif, juga membawa implikasi kehidupan. Sehingga Kalurahan Caturtunggal menjadi daerah yang sangat kompleks dengan berbagai aktivitas. Kawasan wilayah Kalurahan Caturtunggal adalah kawasan trans-sosial antara wilayah perkotaan dengan pedesaan, dengan perkembangan komunitas pendatang, pedagang, pengusaha, maupun pencari kerja yang akseleratif sehingga terjadi peningkatan kebutuhan hidup. Di samping karakteristik sosial komunitas mahasiswa dari berbagai daerah yang beragam.

Adapun luas wilayah sesuai dengan peta Kalurahan, maka luas wilayah Kalurahan Caturtunggal adalah 889.7480 (889 ha 7480 m²), yang atas dasar penggunaannya dirinci sebagai berikut:

- Persawahan : 30.5142 ha
- Tegal : 137.3503 ha
- Pekarangan : 678.4077 ha
- Lain-lain : 43.4758 ha

Adapun batas wilayah di Kalurahan Caturtunggal yaitu;

- Sebelah Utara : Kalurahan Condongcatur, Kec. Depok Sleman
- Sebelah Timur : Kalurahan Maguwoharjo, Kec. Depok Sleman
- Sebelah Selatan : Kalurahan Demangan, Kec, Kota Yogyakarta
- Sebelah Barat : Kalurahan Mlati, Kec. Mlati.

2. Orbitasi/ jarak dari pusat – pusat pemerintahan

Secara geografis letak Desa Caturtunggal terhadap pusat-pusat kota dan pemerintahan relatif dekat dan mudah terjangkau, selengkapnya sebagai berikut;

Jarak dari Kecamatan Depok : 1,5 km

Jarak dari Kabupaten Sleman : 10 km

Jarak dari Provinsi : 5 km

Jarak dari Ibukota Negara : 630 km

Secara umum keadaan tanah yang ada di wilayah Kalurahan Caturtunggal tergolong tanah yang subur (produktif), hal ini dapat dilihat dari adanya lapisan humus dalam tanah yang cukup tebal dan dapat dibuktikan dengan hasil pertanian yang cukup baik. Sehingga warga masyarakat

sebagian bercocok tanam, khususnya wilayah Kalurahan Caturtunggal sebelah Timur Sungai Gajah Wong. Namun karena kebijakan Pemerintah Kabupaten Sleman yang menetapkan wilayah Kecamatan Depok sebagai daerah urban dan pemukiman, maka daerah persawahan berubah menjadi bangunan perumahan dan pertokoan. Akhirnya area persawahan menjadi menyempit, namun demikian sektor pertanian masih tetap eksis.

Dilihat dari iklim, wilayah Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian tanah dari permukaan laut 150 MDPL, dengan suhu rata-rata 26°C sampai 32°C dengan curah hujan rata-rata 2704 mm/tahun.

Keadaan air di wilayah Kalurahan Caturtunggal cukup memadai, karena disebelah utara dialiri Selokan Mataram yang membujur dari barat ke timur. Selain itu, Kalurahan Caturtunggal juga dilalui sungai-sungai yang cukup besar seperti Sungai Code di sebelah barat. Sungai Gajah Wong yang membelah Kalurahan Caturtunggal dan Sungai Tambakbayan di sebelah timur. Ketiga sungai ini merupakan sumber pengairan bagi pertanian di Kalurahan Caturtunggal. Untuk keperluan pemakaian air sebagian besar menggunakan sumur gali dan sumur pompa serta berlangganan PDAM.

B. Keadaan Demografis

Masyarakat Desa Caturtunggal Merupakan masyarakat sosio kultural yang terdiri dari berbagai macam suku dari berbagai macam wilayah Indonesia. Fasilitas Pendidikan di Desa Caturtunggal sangat memadai ditandai dari sejumlah perguruan tinggi ternama baik negeri maupun swasta semisal Universitas Gajah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, UPN Veteran, Universitas Sanata Dharma, Universitas Atma Jaya dan sebagainya. Dengan jumlah penduduk pada Januari tahun 2021 sejumlah 46.070, dengan laki-laki sebanyak 22.860, perempuan 23,210 dan jumlah KK sebanyak 15.921 KK dalam wilayah Desa Caturtunggal.

1. Jumlah Penduduk Menurut Umur

Kependudukan merupakan suatu hal yang penting untuk diperhatikan dengan serius dan baik, dikarenakan penduduk merupakan salah satu elemen yang wajib dimiliki oleh suatu wilayah yang memiliki pemerintahan. Eksistensi suatu wilayah yang memiliki pemerintahan akan diakui apabila memiliki penduduk. Di dalam suatu pemerintahan, penduduk tentu tidak hanya dijadikan objek melainkan dijadikan subjek juga. Sebab itu, maka perlu adanya mengklasifikasikan penduduk dengan berdasarkan umur guna untuk melihat potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Kalurahan Caturtunggal.

Tabel 2.2

Jumlah Penduduk Menurut Umur

| Usia | Caturtunggal | | |
|-------------|--------------|--------|--------|
| | L | P | L-P |
| 0-14 tahun | 4.657 | 4.287 | 8.944 |
| 15-64 tahun | 15.566 | 16.003 | 31.569 |
| 64 ke atas | 1.841 | 2.441 | 4.282 |
| Jumlah | 22.064 | 22.731 | 44.795 |

<https://kependudukan.jogjaprovo.go.id/>

Dari tabel diatas dapat kita lihat jumlah usia penduduk menurut umur menunjukkan, penduduk dari umur 0 sampai 14 tahun ada pada angka 8.944 dan usia 15 sampai 64 berjumlah 31.569 sedangkan 64 ke atas di angka 4.282 dengan jumlah total penduduk kalurahan Caturtunggal sebanyak 44.795, dari sini terlihat bahwa penduduk Caturtunggal paling banyak diisi oleh penduduk dari usia 15 sampai 64 yang berjumlah 31.569 yang dalam usia sedang bersekolah sampai usia produktifnya.

2. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal yang paling penting dalam kehidupan seseorang, dan juga dalam kehidupan bermasyarakat, karena pendidikan memiliki konsep tersendiri untuk menentukan keahlian dan keterampilan seseorang. Pendidikan dapat menentukan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pendidikan bukan lagi suatu hal

yang baru, karena pendidikan pada umumnya merupakan tolak ukur dari kualitas seseorang. Dalam kehidupan bermasyarakat pendidikan penting, dikarenakan pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran dalam kehidupan guna untuk meningkatkan pengetahuan dalam berpikir, dan dapat menentukan tindakan seseorang dalam bermasyarakat. Pendidikan juga merupakan salah satu yang dapat mempengaruhi bagaimana keterlibatan seseorang di dalam pemerintahan, adapun seseorang yang berpendidikan tidak dapat terlibat langsung dalam ranah pemerintahan. Sebab itu, sangat perlu untuk mengklasifikasikan penduduk berdasarkan tingkat pendidikan guna untuk melihat potensi masyarakat yang di Kalurahan Caturtunggal.

Tabel 2.3

Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

| No | Jenjang pendidikan | Jumlah |
|----|---------------------------|--------|
| 1 | Tidak Sekolah | 6.848 |
| 2 | Belum Tamat SD/MI | 3.680 |
| 3 | Tamat SD/MI | 3.602 |
| 4 | SMP/MTs | 4.624 |
| 5 | SMA/SMK/MA | 13.429 |
| 6 | Diploma I/II | 637 |
| 7 | Akademi/Diploma III/S.Mud | 2.333 |
| 8 | Diploma IV/Sastra I | 8.029 |
| 9 | Strata II | 1396 |
| 10 | Strata III | 217 |
| | Total | 44.795 |

<https://kependudukan.jogjaprovo.go.id>

Dari tabel diatas jumlah penduduk menurut Pendidikan menunjukkan, penduduk yang tidak bersekolah dan tidak tamat sekolah terbilang sedikit jika dibandingkan dengan yang tamat SMA/SMK/MA, Diploma dan Strata I yang memiliki jumlah yang cukup tinggi sehingga dapat dikatakan Kalurahan Caturtunggal memiliki jumlah SDM yang mampu menggendong perekonomian.

3. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian

Pekerjaan/mata pencarian merupakan suatu hal yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia, apabila tanpa pekerjaan/mata pencarian seseorang akan mengalami kesulitan dalam hidupnya, sebab manusia bergantung dari pendapatannya. Manusia mempunyai akal budi dan kebijaksanaan di dalam kehidupannya dan berhak untuk mengembangkan kemampuannya untuk mendapatkan suatu pekerjaan diinginkannya. Namun, banyak juga yang tidak mendapatkan pekerjaan mungkin dikarenakan tidak mampu mengembangkan kemampuannya. Maka perlu untuk mengklasifikasikan penduduk berdasarkan pekerjaan/mata pencarian yang di Kalurahan Caturtunggal, guna untuk melihat potensi kesejahteraan masyarakat caturtunggal.

Tabel 2.4

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

| No | Jenis Pekerjaan | Jumlah |
|-------|---------------------------------------|--------|
| 1 | Mengurus rumah tangga | 7.000 |
| 2 | Pelajar/mahasiswa | 6.554 |
| 3 | Pensiunan | 1.500 |
| 4 | Belum bekerja | 1.102 |
| 5 | ASN | 1.166 |
| 6 | TNI | 69 |
| 7 | Polri | 66 |
| 8 | Pejabat Negara | 4 |
| 9 | Buruh/Tukang Berkeahlian Khusus | 1.785 |
| 10 | Sektor Pertanian/perikanan/peternakan | 185 |
| 11 | Karyawan BUMN/BUMD | 315 |
| 12 | Karyawan Swasta | 8.803 |
| 13 | Wiraswasta | 6.644 |
| 14 | Tenaga Medis | 337 |
| 15 | Pekerjaan Lainnya | 304 |
| Total | | 35.851 |

<https://kependudukan.jogjaprovo.go.id/>

Dari tabel diatas menunjukkan jumlah penduduk menurut mata pencaharian, menunjukkan variatif yang cukup banyak jika dilihat dari tabel diatas menunjukkan kebanyakan penduduk

Kalurahan Caturtunggal bekerja atau bermata pencaharian dalam bidang wiraswasta atau karyawan swasta dengan paling sedikit di isi bidang aparatur Negara seperti Pejabat Negara, TNI dan POLRI. Dari jumlah belum bekerja yang terbilang sedikit yang berada dalam angka 1.102 jika dibandingkan total masyarakat, hal ini juga tidak bisa dibiarkan sehingga pemerintah perlu memperhatikan 1.102 orang ini agar dapat mengembangkan kemampuan dan memanfaatkan tenaga mereka untuk mendorong perekonomian keluarganya.

C. Sosial Budaya dan Kelembagaan

Bidang sosial budaya dan kelembagaan dalam penyusunan RPJM Kalurahan Caturtunggal meliputi hampir segala aspek sosial kebudayaan dan kelembagaan yang meliputi kehidupan masyarakat Kalurahan Caturtunggal yang merupakan Kalurahan yang penuh dengan keragaman dan potensi sosial budaya kelembagaan.

Perspektif budaya masyarakat di kalurahan Caturtunggal ini masih sangat kental dengan budaya Jawa, hal ini dapat dimengerti karena hampir keseluruhan kalurahan di Kabupaten Sleman masih terpengaruh dengan adanya pusat kebudayaan Jawa yang tercermin dari keberadaan Keraton Kesultanan maupun Pakualaman yang ada di Provinsi Yogyakarta. Dari latar belakang budaya kita dapat melihat aspek budaya dan sosial masyarakat Kalurahan Caturtunggal.

Permasalahan yang terjadi terkait pada bidang sosial budaya masyarakat Kalurahan Caturtunggal masih adanya kesenjangan sosial yang terjadi ditengah masyarakat, kurangnya partisipasi dan pentas seni adalah salah satu masalah-masalah sosial budaya dan kelembagaan yang terjadi di Kalurahan Caturtunggal.

Sedangkan potensi dari kelembagaan yang ada dapat ditemukan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK), Kader Pembangunan Kalurahan (KPD), Karangtaruna dan PKK. Melalui Lembaga tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan sosial dengan program programnya. Dari permasalahan dan potensi yang ada menjadi prioritas bagi pemerintah Kalurahan untuk meningkatkan kinerjanya dalam meningkatkan fungsi nya sebagai Lembaga Pemerintahan yang letak nya paling dekat dengan masyarakat.

Table 2.5**Keadaan Sosial Budaya dan Kelembagaan**

| No | Masalah | Potensi | Lokasi |
|-----------|---|--|---------------|
| 1 | Masih ada warga yang kurang peduli masalah sosial budaya | <ul style="list-style-type: none">● Adanya organisasi kelembagaan di tingkat padukuhan : PKK, Yasinan, Muda mudi● adat istiadat ada,● kesenian tradisional masih dijunjung tinggi. | 20 Padukuhan |
| 2 | Masih ada kelompok pemuda yang tidak aktif | <ul style="list-style-type: none">● Organisasi kelembagaan PKK, Yasinan, Muda mudi.● Solidaritas tinggi● Gotongroyong bagus. | 20 Padukuhan |
| 3 | Kurangnya tenaga pengajar untuk TPA | <ul style="list-style-type: none">● Pembinaan Akhlak dan Budi Pekerti Masih sangat dibutuhkan | 20 Padukuhan |
| 4 | Masih ada kesenjangan sosial dalam masyarakat | <ul style="list-style-type: none">● Tidak ada keributan dalam padukuh manapun antar Padukuhan | 20 Padukuhan |
| 5 | SDM pengurus kelembagaan yang masih rendah serta tidak semua pengurus aktif | <ul style="list-style-type: none">● Terdapat program-program pelatihan dan penyuluhan organisasi kepemudaan tentang organisasi kepemudaan | 20 Padukuhan |

| | | | |
|---|---|--|--------------|
| 6 | Kurangnya pementasan seni tingkat padukuhan | <ul style="list-style-type: none"> ● Minat masyarakat terhadap kesenian tradisional masih cukup tinggi ● Adanya program yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten | 20 Padukuhan |
| 7 | Kurangnya kesadaran akan partisipasi turut merawat bangunan publik/fasilitas umum | <ul style="list-style-type: none"> ● Terdapat beberapa struktur organisasi dalam masyarakat : ● Kelompok Tani ● LPMD ● RT/RW ● PKK ● Takmir Masjid ● Adatistiadat masih cukup terjaga (kenduren, mitoni, yasinan,dll) | 20 Padukuhan |
| 8 | Kurangnya minat, terutama generasi muda, akan kesenian lokal dan pemeliharaannya | <ul style="list-style-type: none"> ● Adanya sanggar seni ● Kesenian bernafaskan islam masih berkembang ● Struktur kelembagaan masyarakat tersusun baik ● Swadaya masyarakat untuk pembangunan padukuhan tinggi | 20 Padukuhan |
| 9 | Kurang terkoordinasinya Kerjasama antar RT/RW dengan KKLPM | <ul style="list-style-type: none"> ● Adanya kepengurusan lengkap | 20 Padukuhan |

| | | | |
|----|--|---|--------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> ● Sering adanya rembung padukuhan sebagai ajang menyerap aspirasi/pendapat warga | |
| 10 | Organisasi pemuda kepengurusannya kurang jelas | <ul style="list-style-type: none"> ● Kesadaran pemuda untuk berorganisasi cukup tinggi, sudah ada kegiatan bagi pemuda ● Mempunyai solidaritas tinggi | 20 Padukuhan |
| 11 | Kurangnya ilmu mengenai kelembagaan | <ul style="list-style-type: none"> ● Perangkat dan sarana prasarana padukuhan cukup lengkap ● Terdapat Dasawisma, PKK, LPMD, RT/RW ● Organisasi pemuda kepengurusannya jelas ● Terdapat anggota dari masyarakat yang aktif dalam organisasi formal di tingkat Universitas yang dapat menularkan ilmu-ilmu kelembagaan | 20 Padukuhan |
| 12 | Sebagian organisasi pasif | <ul style="list-style-type: none"> ● Terdapat organisasi pemuda, PKK, LPMD yang | 20 Padukuhan |

| | | | |
|----|---|--|--------------|
| | | memfokuskan organisir pada pembangunan padukuhan | |
| 13 | Kegiatan banyak yang langsung diselenggarakan di RT masing-masing | <ul style="list-style-type: none"> ● Masyarakat relative kompak | 20 Padukuhan |
| 14 | Kadang terdapat konflik dalam pemuda, terutama dengan pemuda luar padukuhan | <ul style="list-style-type: none"> ● Kultur masyarakat terjaga ● Kesenjangan sosial tidak mencolok | 20 Padukuhan |

Sumber: caturtunggalsid.slemankab.go.id

D. Potensi dan Produk Unggulan Ekonomi Produktif

Kalurahan Caturtunggal memiliki banyak potensi dari berbagai macam lini yang terbilang cukup baik dalam perkembangannya seperti, *pertama* Pendidikan terdapat 23 Perguruan Tinggi Negeri (misalnya: Universitas Gajah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga) maupun swasta (misalnya: Universitas Sanata Dharma, Atma Jaya, UII dan UPN). *Kedua* Kesehatan Kalurahan caturtunggal memiliki 3 Rumah Sakit besar negeri maupun swasta yaitu: RS. Sardjito, RS. Panti Rapih, RS. Siloam dan pusat Kesehatan warga terdiri dari Puskesmas Depok 3 dan UGM. *Ketiga* seni dan adat, perka seni dan ada yang dilaksanakan setiap tahun di Kalurahan Caturtunggal khususnya di Padukuhan Samirono berupa Saparan “Festival Kluwung Adat”. *Keempat* ekonomi, terdapat ruko-ruko dan mall besar (missal: Plaza Ambarrukmo), pasar tradisional serta asrama mahasiswa yang dikelola dari tanah khas desa. *Kelima* pemerintahan terdapat pelayanan warga dengan sistem pelayanan terpadu yang sangat membantu pelayanan terhadap warga secara cepat, tepat, efektif dan efisien.

Permasalahan yang paling banyak dirasakan dalam bidang potensi dan produk unggulan Kalurahan Caturtunggal masih adanya pengangguran atau kurang nya lowongan pekerjaan dan permasalahan modal.

Table 2.6**Bidang potensi dan Produk unggulan Ekonomi Produktif**

| No | Masalah | Potensi | Lokasi |
|-----------|---|--|---------------|
| 1 | Hamper terdapat pengangguran terbanyak terselubung 10% dari jumlah penduduk | <ul style="list-style-type: none"> ● Jumlah usia produktif sangat banyak ● Kesempatan/lapangan kerja ● Terdapat unit kegiatan masyarakat UKM di tiap Padukuhan ● Terdapat industri kecil sehingga mampu menyerap tenaga kerja ● Kegiatan di tiap-tiap pedukuhan sudah terjadwal dan sudah rutin dilakukan ● Minat membuka usaha wiraswasta tinggi ● Bantuan dana dari pemerintah Kelurahan, BKM, PNPM mandiri yang sudah tersalur dengan baik | 20 Padukuhan |
| 2 | Terbatasnya dana untuk pembuatan Kesekretariatan UKM dan kelompok Tani | <ul style="list-style-type: none"> ● Banyaknya kegiatan peternakan yang dilakukan dengan skala rumah tangga ● Ada perkumpulan petani ● Perkumpulan tani mempunyai banyak manfaat seperti adanya penyuluhan dan bantuan bibit sebagai stimulan, yang memberi penyuluhan adalah perwakilan dari dinas pertanian ● Terdapat berbagai kegiatan industri kecil | 20 Padukuhan |
| 3 | Terbatasnya modal usaha | <ul style="list-style-type: none"> ● Pemberdayaan di sektor ekonomi tinggi ● Minat membuka usaha wiraswasta tinggi ● Adanya program penyuluhan keterampilan dan motivasi yang diselenggarakan oleh pemerintah kelurahan dan dinas terkait | 20 Padukuhan |

| | | | |
|---|---|--|--------------|
| 4 | Keterbatasan kepemilikan lahan terutama oleh masyarakat lokal | <ul style="list-style-type: none"> ● Penyewaan lahan dari tempat lain | 20 Padukuhan |
| 5 | Intensitas penyuluhan pertanian yang masih jarang | <ul style="list-style-type: none"> ● Terdapatnya kelompok tani sebagai fasilitator utama pengadaan penyuluhan pertanian ● Tersedianya tenaga penyuluh di tingkat kecamatan ● Adanya fasilitas kredit dan pinjaman dari pemerintah, BMT, dan Lembaga lainnya. | 20 Padukuhan |
| 6 | Terbatasnya dana dan modal usaha yang dimiliki untuk melakukan kegiatan pertanian ,peternakan dan ekonomi produktif lainnya | <ul style="list-style-type: none"> ● Jalinan Kerjasama dengan perusahaan besar (Nasional) sebagai mitra binaan ● Kelompok ternak yang aktif dalam melakukan kegiatan ● Jumlah penduduk usia produktif tinggi | 20 Padukuhan |
| 7 | Keterampilan dan skil uang terbatas dari masyarakat terutama dalam kewirausahaan | <ul style="list-style-type: none"> ● Adanya pelatihan ketrampilan yang diselenggarakan oleh pemerintah kalurahan bekerjasama dengan pihak terkait ● Minat membuka usaha wirasuasta yang tinggi ● Adanya fasilitas kredit dan pinjaman dari koperasi, pemerintah, BMT, dan Lembaga lainnya | 20 Padukuhan |
| 8 | pendapatan dari sektor pertanian yang rendah karena biaya produksi yang semakin tinggi | <ul style="list-style-type: none"> ● Jalinan Kerjasama dengan pengusaha besar (Nasional) sebagai mitra binaan ● Kelompok ternak yang aktif dalam melakukan kegiatan ● Adanya pemanfaatan hasil dan sisa pertanian dalam bentuk <i>integrated farming system</i> ● Adanya penyuluhan pertanian, peternakan di masing masing kecamatan ● Adanya kelompok ternak yang aktif melakukan kegiatan | 20 Padukuhan |
| 9 | Penerapan teknologi pertanian yang masih | <ul style="list-style-type: none"> ● Adanya penyuluhan di masing-masing kecamatan | 20 Padukuhan |

| | | | |
|----|--|---|--------------|
| | tradisional dan terbatasnya ketersediaan informasi terbaru dibidang pertanian dan peternakan | <ul style="list-style-type: none"> ● Adanya kelompok pertanian yang aktif ● Adanya media informasi yang berkelanjutan dan dikelola oleh pemerintah kelurahan ● Adanya fasilitas pinjaman dari koperasi, pemerintah dan Lembaga lainya | |
| 10 | Pengelolaan limbah hewan ternak belum optimal | <ul style="list-style-type: none"> ● Jaringan Kerjasama dengan perusahaan (Nasional) sebagai mitra binaan masyarakat, kader kesehatan ● Swadaya masyarakat cukup besar ● Bantuan dana dari pemerintah dan kelurahan, BKM dan PNPM Mandiri yang sudah tersalur | 20 Padukuhan |
| 11 | Kandang kelompok sudah rusak | <ul style="list-style-type: none"> ● Adanya sumber daya alam seperti batu dan pasir untuk pembangunan ● Tingginya minat masyarakat berwiraswasta | 20 Padukuhan |
| 12 | Jenis pekerjaan masyarakat tidak tetap pendapatannya dan penghasilan rata-rata masyarakat tersebut masih dibawah UMR | <ul style="list-style-type: none"> ● Adanya perkumpulan petani ● Perkumpulan tani mempunyai manfaat yang baik, seperti adanya penyuluhan dan bantuan bibit sebagai stimulan yang memberikan penyuluhan dari perwakilan dinas pertanian ● Tempat berbagai kegiatan industri kecil | 20 Padukuhan |
| 13 | Keterbatasan modal dari warga sehingga belum mampu menciptakan usaha sendiri | <ul style="list-style-type: none"> ● Keinginan masyarakat untuk bekerja sangat tinggi | 20 Padukuhan |

Sumber: caturtunggalsid.slemankab.go.id

E. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai makna atau tujuan tertentu. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses misalnya usaha, pembangunan dan proyek tertentu.

Sarana dan prasarana juga merupakan suatu hal yang harus diperhatikan secara khusus, karena sarana dan prasarana dapat memberikan/mendukung yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat setempat.

Mengenai Sarana dan Prasarana yang ada dalam wilayah Kalurahan Caturtunggal yaitu:

1. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Merupakan suatu faktor pendukung majunya suatu wilayah. Sarana Pendidikan adalah salah satu faktor yang sangat penting keberadaanya demi berlangsungnya kegiatan belajar mengajar, dimana masyarakat dapat mengenyam Pendidikan demi menaikan potensi diri masyarakat tersebut.

Tabel 2.7

Sarana dan Prasarana Pendidikan

| No | Sarana Pendidikan | Jumlah |
|-------|-------------------|--------|
| 1 | SLB | 1 |
| 2 | TK | 30 |
| 3 | SD | 20 |
| 4 | SMP | 5 |
| 5 | SMA | 9 |
| 6 | Perguruan Tinggi | 21 |
| Total | | 86 |

Sumber : Kecamatan Depok dalam angka 2019

Dari tabel diatas sarana dan prasarana Pendidikan yang ada di wilayah Kalurahan Caturtunggal ini dapat terbilang cukup memadai dimana banyaknya pilihan atau fasilitas apa yang ingin diambil dari Pendidikan tersebut dapat dengan mudah menghasilkan Sumber Daya Manusia yang baik dan banyak nya Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta dimana hal ini juga membuka banyak peluang bagi masyarakat dapat mengenyam Pendidikan yang baik.

Dari jumlah yang ada seharusnya dapat memenuhi kebutuhan dan menampung masyarakat Kalurahan Caturtunggal untuk dapat Pendidikan yang baik yang bisa memajukan perekonomian keluarga dan bahkan daerah. Berdasarkan tabel diatas

dapat disimpulkan bahwa fasilitas belajar adalah sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang kegiatan belajar untuk mencapai tujuan mencerdaskan kehidupan Bangsa.

2. Sarana dan Prasarana Ibadah

Sarana dan prasarana ibadah merupakan fasilitas bagi umat beragama yang dapat memenuhi kebutuhan peribadatan secara berjamaah. Sehingga dapat memenuhi kebutuhan rohaninya. Sebuah komunitas masyarakat memiliki kebutuhan batin dimana manusia sebagai makhluk yang memiliki kepercayaan membutuhkan fasilitas yang berupa. bangunan rumah Ibadah, kebebasan beragama dan lain sebagainya sesuai kepercayaan yang dianutnya.

Table 2.8

Sarana dan Prasarana Ibadah

| No | Sarana Ibadah | Jumlah |
|-------|---------------|--------|
| 1 | Masjid | 73 |
| 2 | Mushola | 25 |
| 3 | Gereja | 10 |
| 4 | Pure | 0 |
| 5 | Vihara | 6 |
| Total | | 114 |

Sumber : Kecamatan Depok dalam angka 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah rumah ibadah yang ada

dalam Kawasan wilayah Kalurahan Caturtunggal cukup beragam, dari jumlah tersebut dapat menggambarkan mayoritas agama yang dianut oleh masyarakat yaitu agama Islam dimana jumlah tersebut juga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan memenuhi kapasitas umat yang ada dalam Kawasan Kalurahan Caturtunggal baik yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan bahkan Budha.

3. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sarana dan prasarana Kesehatan merupakan tempat yang digunakan dalam menyelenggarakan upaya Kesehatan dan penunjang kesejahteraan masyarakat, sebagai bentuk keadaan sejahtera masyarakat dari badan, jiwa dan sosial yang dimana setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi jika kebutuhan penunjang kesehatannya terpenuhi dan mudah didapat.

Tabel 2.9

Sarana dan Prasarana Kesehatan

| No | Sarana Kesehatan | Jumlah |
|-------|------------------|--------|
| 1 | Puskesmas | 1 |
| 2 | Dokter Praktek | 35 |
| 3 | Poliklinik | 6 |
| 4 | RS Bersalin | 0 |
| Total | | 42 |

Sumber : kecamatan Depok dalam angka 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah penunjang Kesehatan di wilayah Kalurahan Caturtunggal terlihat sedikit jika dilihat dari jumlah masyarakat dirasa fasilitas yang ada dirasa belum memenuhi kebutuhan masyarakat, fasilitas Kesehatan yang ada harusnya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah atau kabupaten untuk meningkatkan kapasitas Puskesmas sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam kehidupan masyarakat.

F. Aspek Pemberdayaan yang Dijalankan oleh Pemerintah Kalurahan Caturtunggal

Pemberdayaan yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan Caturtunggal melalui kegiatan;

1. Pengelolaan Sampah

Keberadaan sampah hingga saat ini menjadi permasalahan global dan menjadi permasalahan yang terjadi di hampir seluruh wilayah perkotaan termasuk wilayah Caturtunggal, dimana jumlah penduduk yang terus berkembang sementara daya lingkungan dan tanah terbatas mengakibatkan kesulitan dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Pada 2019 Pemerintah Kalurahan Caturtunggal Mengeluarkan anggaran sebesar Rp. 4.910.000 untuk pelatihan pengelolaan sampah yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan pengelolaan sampah di Kalurahan Caturtunggal.

2. Pembinaan dan Pemberian Bantuan Sosial

Pemerintah Kalurahan Caturtunggal setiap tahun selalu menganggarkan bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan penyandang disabilitas. Selain itu pemerintah Kalurahan Caturtunggal juga memberikan bantuan sosial atau stimulan kepada Lembaga atau kelompok masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan sosial.

3. Fasilitasi Tim penanggulangan kemiskinan Tingkat Kalurahan Dan Padukuhan

Seperti tahun-tahun sebelumnya, Pemerintah Kalurahan Caturtunggal memfasilitasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kalurahan dan Padukuhan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh tim tersebut mengupdate data kemiskinan yang ada di Kalurahan Caturtunggal data ini bertujuan untuk memperoleh basis data yang akurat terkait jumlah keluarga miskin dan rentan miskin yang ada di Kalurahan Caturtunggal.

4. Fasilitas Pembinaan PMKS

Kalurahan Caturtunggal terdapat beberapa warga yang dikategorikan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), seperti penyandang disabilitas, Wanita dengan masalah ekonomi dan sosial, untuk pendataan kriteria PMKS di wilayah Kalurahan Caturtunggal mengusulkan pada Dinas Sosial Kabupaten Sleman, berupa rekomendasi pelayanan Kesehatan, tempat tinggal dan pembinaan Pendidikan Khusus (bagi penyandang disabilitas) sesuai dengan kriteria PMKS.

5. Pembinaan dan Pemberian Stimulan Bagi Kelompok-kelompok Masyarakat

Dalam rangka menghidupkan dan mengembangkan kegiatan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat, pemerintah Kalurahan Caturtunggal setiap tahun mengalokasikan bantuan stimulan bagi

Kelompok-kelompok tersebut. Beberapa kelompok tersebut terus berkembang diantaranya kelompok ternak yang berada di Padukuhan. Dan Pada Tahun 2019 pemerintah Kalurahan Caturtunggal memberikan bantuan pada kelompok tani, ternak, serta kelompok lainya seperti kelompok seni dan budaya yang hidup berkembang di tengah tengah masyarakat.

6. Pembinaan dan Pemberian Stimulan Bagi Kegiatan Warga

Dalam satu tahun, kegiatan masyarakat yang secara rutin di wilayah masing-masing terutama terkait dengan kegiatan seni dan budaya (tradisi) yang hingga saat ini masih dilestarikan. Tujuan utama pemberian stimulan tersebut untuk melestarikan kegiatan yang telah menjadi tradisi bagi masyarakat, sekaligus berupaya melakukan regenerasi kepada pelaku utama pada kegiatan tersebut. Pemerintah Kalurahan Caturtunggal memberikan ruang yang cukup luas bagi masyarakat dalam berbagai kesempatan dalam pagelaran kegiatan budaya desa.

7. Kegiatan Non Fisik Lainnya

Beberapa program yang non fisik lainnya bersifat pembinaan maupun pelatihan yang dilakukan pemerintah Kalurahan Caturtunggal pada tahun 2019, meliputi;

- a. Pembinaan KWT
- b. Pembinaan LPMD
- c. Pelatihan olahan sayuran Padukuhan kledokan

- d. sosialisasi kebijakan UU Desa Aman Pangan
- e. Pembinaan dan pelatihan hama tanaman hortikultura
Padukuhan Nologaten
- f. Kerja bakti P3A Padukuhan Gowok
- g. Wana Desa Gowok dan Tambakbayan
- h. Pembinaan pengelolaan pengguna pasar Desa
- i. Pelatihan membuat Padukuhan Karangmalang
- j. Pembinaan dan pendataan industri kecil UKM
- k. Bulan bakti gotong royong
- l. Pelatihan hasil olahan bahan baku cabai Padukuhan Kledokan
- m. Pelatihan PUPM Pembuatan Pakan Ternak Kelompok
Manunggal Karso Padukuhan Gowok
- n. pengelolaan sampah menjadi kerajinan dan kompos.

G. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal)

Gambar 2.1



Sumber: caturtunggalsid.slemankab.go.id

Diatas adalah infografis APBKal Caturtunggal Tahun 2023 dengan urutan penggunaan dana sebagai berikut, penyelenggaraan pemerintah kalurahan 46.34%, pelaksanaan pembangunan 26.58%, pembinaan masyarakat 13.44%, pemberdayaan masyarakat 10.08%, penanggulangan bencana darurat dan mendesak 3.56%

dari gambar dan urutan diatas bisa disimpulkan penganggaran dan penggunaan dana APBKal masih terfokus pada bidang pembangunan

dengan penggunaan dana paling besar yaitu 46.34% dimana pemberdayaan masyarakat berada pada urutan empat dengan penggunaan anggaran 10.08%.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil paparan terkait penelitian diatas, maka dalam bab ini secara umum menyajikan kesimpulan serta saran dari kajian yang telah dilakukan peneliti. Pada bagian kesimpulan, peneliti akan menggambarkan Governability Pemerintah Kalurahan Caturtunggal Dalam Pemberdayaan Masyarakat. Kemudian pada bagian saran akan disajikan berdasarkan hasil temuan yang telah termuat dalam beberapa bab diatas.

A. KESIMPULAN

Dengan mengoptimalkan asset manusia, asset keuangan dan asset sosial diharapkan program pemberdayaan masyarakat Kalurahan Caturtunggal dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar lagi bagi masyarakat Kalurahan Caturtunggal. Langkah-langkah berikut sekiranya akan membantu Kalurahan Caturtunggal dalam perannya mewujudkan Kalurahan yang mandiri dan memiliki kesejahteraan hidup yang baik.

1. Kewenangan pemerintah Kalurahan Caturtunggal dalam pemberdayaan masyarakat, dalam meningkatkan asset manusia sejauh ini masih belum optimal jika dilihat dari program yang diberikan atau kebijakan yang telah dibuat pemerintah Kalurahan Caturtunggal dan hasil yang masih kurang dalam meningkatkan kriteria asset manusia, asset keuangan dan asset social.

2. Otoritas pemerintah Kalurahan Caturtunggal dalam pemberdayaan masyarakat, dalam meningkatkan aset manusia, aset keuangan dan aset sosial dalam pengembangan Pendidikan lanjutan, usaha mikro dan organisasi masih belum optimal dimana kurangnya penganggaran serta tenaga pengajar dalam pemberdayaan masyarakat. yang baik.

B. SARAN

Berdasarkan pengkajian penelitian ini, maka penulis bermaksud mengajukan saran. Dengan maksud meningkatkan Governability Pemerintah Kalurahan Caturtunggal, yaitu sebagai berikut;

1. Untuk meningkatkan kewenangan kalurahan, perlu melakukan peningkatan kapasitas dan keterampilan sumber daya manusia. Pemerintah Kalurahan dapat bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan dan pelatihan untuk menyediakan program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat Kalurahan Caturtunggal, sehingga masyarakat dapat memiliki ketrampilan dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
2. Untuk meningkatkan otoritas pemerintah kalurahan, perlu melakukan penentuan prioritas terhadap aspek pemberdayaan untuk meningkatkan aspek pemberdayaan masyarakat dan lebih memperhatikan lagi kendala yang dialami oleh masyarakat agar masyarakat dapat berdaya sehingga mereka bisa memajukan dan meningkatkan taraf hidup mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Sutoro Eko Yunanto. (2021). Government Making : Membuat Ulang Ilmu Pemerintahan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta*, 2
- Abdullah, D. (2016). Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. *Jurnal Hukum Positum*, 1(1)
<https://doi.org/10.35706/positum.v1i1.501>
- Almasri, D., Si, M., Deswimar, D., Sos, S., & Si, M. (2014). *Peran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Perdesaan*.
- Boedijono, B., Wicaksono, G., Puspita, Y., Bidhari, S. C., Kusumaningrum, N. D., & Asmandani, V. (2019). Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 4(1), 9–20. <https://doi.org/10.36226/jrmb.v4i1.237>
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi Lokal Desa. *Jurnal MODERAT*.
- Firman, A. A. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Berbasis Komunitas.

Jurnal Tata Sejuta STIA MATARAM.

<http://ejournalstiamataram.ac.id>

Hilman, Y. A., & Nimasari, E. P. (2018). Model Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Komunitas. *ARISTO*.

<https://doi.org/10.24269/ars.v6i1.778>

Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasution, M. A. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 146–154. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.9974>

Margayaningsih, D. I. (2018). Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa. *Jurnal Publiciana*.

Mikhael, W. (2015). Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Politik*.

<https://media.neliti.com/media/publications/1069-ID-strategi-pemerintah-desa-dalam-pemberdayaan-masyarakat-1-studi-bagi-masyarakat-p.pdf>

Noor, M. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 1(2), 87–99. <https://doi.org/10.2307/257670>.Poerwanto.

Pebriyani, D., & Hermawan, E. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tirtawangunan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat. *Inovasi Penelitian*.

Ridwan, M. (2019). Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kota Cirebon. *Journal of Syntax Idea*.

Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*.

<https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.16>

Suswanto, B., Windiasih, R., Sulaiman, A. I., & Weningsih, S. (2019). Peran Pendamping Desa dalam Model Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan. *Jurnal Sosial Suderman*.

Trisnawati, A., Wahyono, H., & Wardoyo, C. (2018). Pengembangan desa wisata dan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan*.

<http://journal.um.ac.id/index.php/jptpp/article/view/10356>

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kebijakan*. 1st ed. ed. Safitri Yosita Ratri.

Bandung: Alfabeta, cv.

Ulumiyah, I. (2013). Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*.

Zuhaqiqi. (20 C.E.). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat. In *Syria Studies*.

https://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civil_wars_12December2010.pdf%0Ahttps://think-asia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/stable/41857625

Peraturan dan Perundang-Undangan

Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Sumber Lain

<https://bpsdmd.jatengprov.go.id/eproper/inovasi.php?id=1285>.

<https://bpps.kemensos.go.id>

<https://depok.slemankab.go.id>

Lampiran



Wawancara Bersama ibu Siti, 26 Januari 2023 (Warga)



Wawancara Bersama Bapak Yacobus, S.E, 28 Januari 2023 (Warga)



Wawancara Bersama Bapak Hendro, 26 Januari 2023 (Warga)



Wawancara Bersama Ibu Fitri, 26 Januari 2023 (Warga)



Wawancara bersama bapak H. Suseno, 26 Januari 2023 (Ketua RT 03)



Bersama Bapak Agus Santos, S.Psi., MM (Lurah), Aminudin Aziz, M.Pd, (Carik),

Dwi Yulianto (Sek BPkal), 30 Januari 2023



Bersama Ibu Irma Wulandari, A.MD. GZ, 13 Februari 2023 (Staf Pamong)



Bersama Bapak Andi Sumarno, S.IP, 13 Februari 2023 (Kepala Pangrita)

PEDOMAN WAWANCARA

DAFTAR INFORMAN

| No | Nama | Posisi | Umur |
|----|--------------------------|-----------------------|------|
| 1 | Agus Santoso,S.Psi.,MM | Kepala Desa/Lurah | 47 |
| 2 | Aminudin Aziz, M.PD | Sekretaris Desa/Carik | 54 |
| 3 | Andi Suwarno, S.IP | Kepala Pangripita | 46 |
| 4 | Dwi Yulianto | Sekretaris BPD | 47 |
| 5 | Irma Wulandari, A.MD. Gz | Staf Pamong | 36 |
| 6 | Yacobus, S.E. | Masyarakat | 42 |
| 7 | H. Suseno | Ketua RT 03 | 55 |
| 8 | Hendro | Masyarakat | 58 |
| 9 | Siti | Masyarakat | 60 |
| 10 | Fitri | Masyarakat | 32 |

- Identitas narasumber

Nama :

Usia :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Pendidikan terakhir :

- Pelaksanaan wawancara

Tanggal wawancara :

Tempat :

A. Daftar Pertanyaan untuk Wawancara dengan Pemerintah Desa:

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam memfasilitasi program pemberdayaan masyarakat desa di Kalurahan Caturtunggal?
2. Bagaimana pemerintah desa berkolaborasi dengan instansi pemerintah lainnya dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa?
3. Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat desa di Kalurahan Caturtunggal?
4. Bagaimana pemerintah desa mengevaluasi efektivitas program pemberdayaan masyarakat desa yang sudah dilaksanakan?
5. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat desa di Kalurahan Caturtunggal?
6. Bagaimana pemerintah desa memastikan bahwa program pemberdayaan masyarakat desa melibatkan semua warga desa dan tidak diskriminatif?
7. Apa langkah-langkah yang sedang diambil pemerintah desa untuk memperbaiki program pemberdayaan masyarakat desa yang sudah ada?

B. Daftar Pertanyaan untuk Wawancara dengan Masyarakat Desa:

1. Bagaimana pendapat Anda tentang program pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa di Kalurahan Caturtunggal?
2. Apa saja manfaat yang Anda peroleh dari program pemberdayaan masyarakat desa yang sudah dilaksanakan?
3. Apa saja kendala atau hambatan yang dialami dalam mengikuti program pemberdayaan masyarakat desa?
4. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat desa?
5. Bagaimana Anda menilai efektivitas program pemberdayaan masyarakat desa yang sudah dilaksanakan?
6. Apakah ada saran atau masukan dari masyarakat desa untuk meningkatkan program pemberdayaan masyarakat desa di Kalurahan Caturtunggal?
7. Bagaimana dampak program pemberdayaan masyarakat desa terhadap kondisi sosial dan budaya di Kalurahan Caturtunggal?